**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK
PIDANA PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2014**

Happy Christian Hutapea
Kejaksaan Negeri Republik Indonesia
Happychristian29@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out the corporate criminal liability of the perpetrators of plantation crimes based on Law Number 39 of 2014 concerning Plantation and to find out the factors that influence the law enforcement of corporate criminal liability for the perpetrators of plantation crime. The research method in this article the author uses the normative legal research method, known as legal research, which emphasizes the study of library documents that relate to the problems and objectives of this study. The approach used is in the form of conceptual and historical approaches. The conclusion that can be drawn from this study the authors describe in the form of corporate criminal liability as a plantation criminal has many weaknesses in the article composition, thus giving rise to new problems during implementation. This is the author's input regarding the affirmation of the model of corporate responsibility in plantation crime in Indonesia.

Keywords: *Corporate, Plantation Crime, Responsibility.*

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan. Metode penelitian dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah legal research, yang menekankan pada studi dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan konseptual dan historis. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini penulis uraikan berupa pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana perkebunan memiliki banyak kelemahan dalam komposisi pasalnya, sehingga menimbulkan permasalahan yang baru saat pelaksanaannya. Hal ini menjadi masukan penulis terkait penegasan model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perkebunan di Indonesia.

Kata Kunci: *Korporasi, Tindak Pidana Perkebunan, Pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup keseluruhan makhluk ciptaan-Nya, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Sumber daya tersebut memiliki sifat dan karakter yang teramat kompleks dan memenuhi segala unsur yang ada di alam ini.¹

Perkembangan Industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia keberadaan korporasi tersebar di berbagai bidang kehidupan. Ada yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, perkebunan, ada juga di bidang sosial, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak jarang diantara korporasi tersebut bukan perusahaan Indonesia. Khusus

di sektor kehutanan, sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak cenderung bukanlah perusahaan Indonesia saja. Justru perusahaan induk (*holding company*) tidak berkedudukan di Indonesia, melainkan di wilayah seperti Singapura atau negara lainnya. Selain itu, hubungan antara *holding company* dengan perusahaan yang berkegiatan di Indonesia pun seringkali tidak langsung, melainkan dilapisi oleh sejumlah SPV atau dikenal juga dengan *shell company* yang sengaja dibuat berkedudukan di wilayah *secrecy jurisdiction*.²

Pendeknya secara ekonomi kehadiran korporasi alias badan usaha tersebut memberi dampak positif kepada negara, namun selain dampak positif, kehadiran korporasi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Diantara dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) seperti pencemaran

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4

²Reda Mantovani, "Penuntutan Korporasi kejahatan kehutanan" dalam http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Reda%20M_Penuntutan%20Korporasi%20dalam%20Kejahatan%20Kehutanan.pdf, terakhir diakses pada 1 Mei 2018 pukul 20.27 Wib

lingkungan, penambangan ilegal, pembakaran hutan, pembunuhan dan penangkapan satwa-satwa liar yang dilindungi. Kejahatan-kejahatan ini sering pula disebut dengan tindak pidana sumber daya alam.³ Kejahatan lain yang dilakukan oleh korporasi adalah mengemplang pajak, penipuan pada konsumen, melakukan penyuapan pada pejabat pemerintah atau petugas pengadilan, dan lain-lain.⁴

Untuk mencegah semakin meluasnya kejahatan korporasi maka sistem hukum nasional sejak tahun 1951 telah memperkenalkan korporasi sebagai subyek delik. Tidak sampai disitu saja, pada tahun 1955 kembali ditegaskan posisi korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana ekonomi sehingga dapat dipertanggungjawabkan pidana. Kehadiran dua undang-undang tersebut, ikut menstimulasi perundang-undangan lain yang juga memosisikan korporasi sebagai subyek delik. Khusus di bidang

sumber daya alam, paling tidak korporasi telah diatur pada lima undang-undang, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Jika memperhatikan rumusan norma pada kelima undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa ada pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain perihal korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana sumber daya alam.

Pengaturan yang berbeda mengenai posisi korporasi sebagai subyek delik dapat dilihat pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ditegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka korporasinya dipidana denda ditambah 1/3.

³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Malang, 2005, hlm.20.

⁴ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata dan pidana. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *Corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Corporation*) berasal dari kata “*Corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *Corporation* sebagai kata benda (*Substantivum*), berasal dari kata kerja *Corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsure animus yang membuat badan itu mempunyai

kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka

kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga di tentukan oleh hukum.⁶

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang diterima dalam rezime lama. Pasal 8 ayat (2) dari *reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, yang lama memuat istilah korporasi, dikatakan “*indien de eischende of verwerende partij eene corporation maatschap of handelsvereniging is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt*”, namun kemudian pada tahun 1938 pasal ini diubah menjadi “*indien de eischende of verwerende partij een rechtsoersoon of vennootschap is zal haar benaming*” dan sebagainya. Mengacu kepada ketentuan pasal 8 kedua ayat (2) dari *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* adalah “sesuatu yang dapat disamakan dengan “person” yakni *rechtspersoon*.”⁷

Kejahatan Korporasi, kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi,

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2010, hlm.23.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 110.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm.24

korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*Rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*Natuurlijk Persoon*).⁸ Istilah kejahatan korporasi digunakan dalam berbagai konteks maupun penamaan. J.E. Sahetapy memberikan catatan penting bahwa istilah kejahatan korporasi (*Corporate Crime*) seringkali digunakan untuk menggambarkan konsep *white-collar crime, organizational crime, organized crime, georganiseerde misdade, groepsriminaliteit, misdade onderneming, crimes of bussiness (bussiness crime), syndicate crime*.⁹

David O. Friedrichs sebagaimana dikutip dalam Mahrus Ali mendefinisikan kejahatan korporasi, sebagai: *offences committed by corporate officials for their corporation or offences of the corporation itself*, yang berarti: tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.¹⁰

Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan

⁸ *Ibid*, hlm.25.

⁹ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 1. Menurut Sahetapy, berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan bertalian dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi, pada dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru; yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya.

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9. Lihat pula Gary Slapper dan Steve Tombs, *Corporate Crime*, London, Great Britain: Longman, 1999, hlm. 16. Mengenai defenisi kejahatan korporasi itu sendiri Friedrichs menyatakan bahwa mengenai defenisi kejahatan korporasi yang tidak dapat diterima oleh semua orang, melahirkan suatu kewajiban bagi para sarjana menentukan bagaimana mereka berniat menggunakan defenisi-defenisi yang ada, sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan dengan penyajian yang diharapkan.

hidup. Tanggungjawab pidana lingkungan hidup adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan

terhadap lingkungan hidup. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*Opzet*) maupun ke alpaan (*Culpa*).¹¹

Ada tiga pendapat para pakar hukum pidana jika korporasi menjadi subjek hukum:

1. Tidak pernah memikirkan adanya eksistensi badan hukum atau korporasi. Perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah yang bertanggung jawab. Pendapat ini mengacu pada asas umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa sebuah perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke person*). Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 59 KUHP yang berbunyi: jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris,

maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya.

2. Mengakui korporasi sebagai pembuat namun yang harus bertanggung jawab adalah pengurusnya.

3. Mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pembuat dan yang bertanggung jawab. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling maju yang menganggap korporasi sebagai subjek hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Latar belakang dari pemikiran ini, sehingga korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana antara lain karena ada anggapan bahwa keuntungan materi yang diperoleh oleh korporasi dari hasil usahanya amatlah besar, maka pidana yang dijatuhkan kepada pengurus dirasa tidak seimbang dan tidak menjamin korporasi untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada pelaku tindak pidana, di

¹¹ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Story Grafika, Jakarta, 2002, hlm.54

pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, memenuhi rumusan delik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar bahwa perbuatan itu *Subjektive Guilt* (kesalahan yang disengaja/kealpaan). Ada banyak contoh-contoh yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan korporasi. Contoh peristiwa di Indonesia yaitu peristiwa munculnya sumber lumpur di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri disekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah analisis yuridis Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan berdasarkan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *Legal research*.¹² menekankan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk analisis pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan berdasarkan Undang-

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.47

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berasal dari asas-asas hukum yang relevan serta doktrin-doktrin hukum pidana. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana

perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber Data diambil dari bahan Hukum Primer, yang diperoleh peneliti dari berbagai perpustakaan, Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, Yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa Peraturan perundang-undangan yang masih menjadi Hukum Positif yaitu UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum,

teori Hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah Hukum.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus bahasa Indonesia, Bahasa Asing, ensiklopedi, dan lainnya.

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti harus cermat dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai analisis pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan Kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan

ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹³

Dalam penelitian ini data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif biasanya data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan penulis selaku peneliti.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus, sedangkan metode berfikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Subjek hukum (*Rechtssubject*) adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum, Yang dapat bertindak sebagai subjek hukum adalah manusia (*natural person*) dan bukan manusia (badan hukum/*legal person*). Dengan demikian, jika korporasi dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut.¹⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai subjek tindak pidana tertentu.¹⁵ Penempatan korporasi

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 5.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 66-67.

sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁶

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa

macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah.

- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana

Kelompok yang setuju, menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting.

- b. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.

¹⁶ Setiyono, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm.42

c. Pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri

Tindak pidana Korporasi menimbulkan kerugian lebih besar jika dibandingkan dengan kejahatan individual atau sering disebut juga sebagai kejahatan konvensional/tradisional. Hal ini diakibatkan oleh karakteristik kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:¹⁸

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*),

yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;

- d. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*), seperti polusi dan penipuan;
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*), sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
- g. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Dalam hal perbuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang ilegal.

Indonesia adalah negara yang telah mengalami proses modernisasi dengan melihat sejarah dan perkembangan kedudukan korporasi dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini memang sudah menjadi suatu keharusan. Glenville Williams dalam bukunya "*Textbook of Criminal Law*" yang menyatakan bahwa dapat dipertanggung-jawabkannya korporasi berdasarkan *utilitarian theory*, dan

¹⁸ Setiyono, *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang, 2002, hlm. 54-55.

semata-mata bukan berdasarkan asas “*theory of justice*” tetapi adalah untuk pencegahan kejahatan.¹⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas dulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya menyangkut masalah subyek hukum pidana pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang tindak pidana yang bersangkutan. Namun, faktanya memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Setelah ditentukan, maka selanjutnya ialah bagaimana pertanggungjawabannya.²⁰

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankan-nya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.²¹ Pembenaran pertanggungjawaban

korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut.²²

1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Perkembangan selanjutnya dalam doktrin pertanggungjawaban korporasi terdapat empat perkembangan:

1. Doktrin *Respondent Superior* yang terkait dengan *imputation of acts committed by individual to the corporation*.
2. *Where specific intent was an element of the crime* yang masih menggunakan asas kesalahan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Alvi Syahrin, *Beberapa Isi Hukum Lingkungan Kepadanaan*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm.26

²¹ Wikipedia, *PertanggungjawabanKorporasi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diunduh pada Selasa 07 Oktober 2018, Pukul 19.20 Wib

²² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31.

3. Digunakannya doktrin *ultra vires*, artinya organ korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka yang melakukan fungsi korporasi yang telah menyimpang dari anggaran dasar korporasi.
4. *Corporate prosecution could not be squired with the rigid procedural requirement of the time, which required.*

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (Korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya yang dinyatakan sebagai “pandangan baru” di atas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan adanya kesalahan, yang di negara-negara *Anglo Saxon* dikenal asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu yang dikenal dengan “*Strict liability*” dan

“*Vicarious liability*”. *Strictliability* sering dikatakan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran /kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.

Alasan untuk menggunakan konsep *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan didalamnya lebih didasarkan kepada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara) suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu.

Vicarious liability yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain atau *the legal responsibility of one person for the wrongful act another*. Dapat dijelaskan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut

mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.

Dahulu ada pandangan yang tidak dapat menerima anggapan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Hal ini karena adanya adigium “*Universitas Deliwquere Non Potest*” yaitu korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut Jhon C. Coffe Jr. Mengemukakan.²³

- a. Perusahaan tidak punya *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat, kesalahan).
- b. Perusahaan bukan seorang pribadi, meskipun perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, yang biasa dilakukan manusia pribadi.
- c. Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (*no soul to damned and no body to be kicked*).
- d. Doktrin *ultra vires* (diluar kewenang-an).

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha,

meningkatkan produk-si, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan

²³ Buchari Said, *Op. Cit*, hlm. 28.

masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, kelestarian, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.²⁴

Melalui ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dijelaskan bahwa; "*Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.*" Selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan arti Perkebunan adalah: "*orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.*" Sedangkan Perusahaan Perkebunan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah: "*Badan usaha yang berbadan hukum,*

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu." Kemudian kedudukan korporasi dipertegas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi: "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*" Ketentuan ini mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum Perkebunan, termasuk pula sebagai subjek hukum (*rechtssubject*) tindak pidana di bidang Perkebunan.

Ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, yang tidak ada menyebutkan bahkan satu kalipun istilah "korporasi". Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam undang-undang perkebunan, berarti korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).

²⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum Perkebunan dan telah mengatur pula mengenai hal yang “diperbolehkan”, dan “dilarang” untuk dilakukan korporasi. Penekanan pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, sesungguhnya bermuara pada dua jenis tindak pidana, yakni: tindak pidana administrasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terkait dengan bidang perkebunan. Tindak pidana administrasi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran izin atau lisensi. Artinya “hak” untuk melakukan segala kegiatan perkebunan muncul dari adanya “izin” dari pejabat yang berwenang, namun jika tidak ada “izin”, maka tindakan tersebut melahirkan “tindak pidana” yang disebut tindak pidana perkebunan, Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup adalah tindak pidana dimana tidak dipenuhinya kriteria baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang

berkaitan dengan kegiatan perkebunan. Kemudian, selain mengatur tindak pidana dalam bentuk perbuatan yang dilarang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur tentang tindak pidana berupa pengabaian kewajiban hukum untuk bertindak.

Model pertanggung-jawaban pidana korporasi tersebut sesungguhnya mengacu pada dua konten pembahasan, yaitu mengenai siapa pembuat dan siapa yang bertanggungjawab. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu, dipidanya pengurus saja tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang tersebut, tetapi setidaknya ketika korporasi dikenakan pertanggungjawaban, dapat berefek sekaligus pada orang-orang yang menjalankan kegiatan korporasi tersebut.

Pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, maka kepada pengurus korporasilah

dibebankan kewajiban dari korporasi. Kewajiban yang dibebankan ini sebenarnya kewajiban korporasi. Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal-hal yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang pengurus dan berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak

pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum itu tidaklah semua kejahatan dapat dilakukan pertanggungjawaban yang sama antara orang ssebagai pribadi dan Korporasi sebagai subjek hukum, Barda Nawawi Arif, melakukan beberapa pengecualian, antara lain:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigamy, perkosaan dan sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada

korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Berdasarkan teori-teori tentang korporasi yang telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya *identification doctrine*, yakni korporasi bisa diminta pertanggung-jawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun kelemahan teori ini adalah hanya berkuat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori *vicarious liability*, yang mana menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk

menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.

Diatas telah diulas perihal belum maksimalnya regulasi dalam sektor sumber daya alam,

ketika mengatur mengenai pertanggung-jawaban pidana korporasi. Marc Ancel mengatakan bahwa *“Criminal policy is the rational organization of the control of crime by society.”* Bahwa yang dikatakan sebagai kebijakan criminal adalah bagian dari usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Seturut dengan itu, kebijakan kriminal sering pula disebut sebagai *criminal policy* yang tujuan akhirnya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁵ Hal ini diamini dalam laporan UNAFEI di Tokyo 1974, *“That most of groups members agreed some discussion that protection of the society could be accepted as the final good of criminal policy,*

although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like happiness of citizens a wholesome and cultural living social welfare or equality”

.Intinya jika membahas tentang *penal policy* maka tercakup tiga hal yakni kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.²⁶ *Penal policy* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor SDA adalah lebih condong pada upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (perundang-undangan pidana) yang focus utama-nya adalah melakukan perbaikan terhadap system pertanggung-jawaban pidana korporasi.

Perbaikan tersebut dimulai pada tahap formulasi, aplikasi Hingga tahap eksekusi. Adapun tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan perlindungan social (*Social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). *Penal policy*, substansinya adalah upaya

untuk mereformulasi peraturan pidana dalam hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman (*guidelines*)

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan RUU KUHP Baru*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2008. hlm.2

²⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

tidak hanya pada pembentuk undang-undang (kebijakan formulasi) tetapi juga oleh pengadilan (kebijakan aplikasi) yang menerapkan undang-undang tersebut. Lebih jauh lagi undang-undang yang telah doformulasikan itu digunakan (kebijakan eksekusi) oleh penyelenggara Negara atau pelaksana putusan pengadilan.

Sebisa mungkin tiga hal tersebut berjalan beriringan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Merujuk pada uraian *penal policy* di atas, maka dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor SDA akan diarahkan pada upaya mereformulasi ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga pada ujungnya dapat memberi kepastian hukum. Selain itu pula mampu mengkomodasi tujuan pembedaan yang tidak sekedar menjatuhkan sanksi pidana tetapi juga memberikan efek jera (*deterrence effect*) agar pelaku-kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya, mampu merehabilitasi mental pelaku kejahatan sebab pidana

dimaknai sebagai obat (*poenae ut medicine*) serta pidana juga diharapkan dapat memulihkan keadilan (*restorative justice*).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu hukum harus dilaksanakan, dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran Hukum.²⁷ Dalam hal adanya pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum, cet I*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga tampak lebih konkrit.²⁸

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁹ Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi cukup sulit diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum,

karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut.³⁰

Kesulitan dalam penegakan hukum akibat tindak pidana korporasi ini menurut Mardjono Reksodiputro, Pertama, korporasi sebagai pelaku kejahatan yang potensial pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. Lebih lanjut Mardjono mengatakan, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini bagi individu, terlihat hanyalah puncak gunung es saja. Contohnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya untuk saat ini tetapi masih akan dirasakan di kemudian hari.³¹

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 1983.hlm.7

²⁹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hlm. 25

³⁰ Erdiansyah, *Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran Hutan dan lahan di Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015, hlm. 160

³¹ *Ibid*

pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah:

a. Faktor Hukum (perangkat peraturan perundang-undangan)

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata,³² Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.³³ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.³⁴ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus kebakaran hutan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (Sengaja dibakar, tidak sengaja dibakar atau tidak sengaja karena punting rokok dan lain sebagainya) sebelum melihat berkas tentang kasus kebakaran hutan tersebut. Artinya,

³² Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2004, hlm.13

³³ *Ibid.* hlm. 13

³⁴ SatjiptoRaharjo, *IlmuHukum*, Alumni, Bandung, 1986. hlm.8

hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya undang-undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:³⁵

Selama ini berbagai undang-undang tertentu telah menempatkan Korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana karena merugikan negara dan atau masyarakat. Namun, sangat minim diproses ke pengadilan karena belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan dakwaan bagi entitas korporasi. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.154

Perma Pidana Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tatacara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan.

Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. *Kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. *Ketiga*, korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan

hilangnya pertanggungjawaban (pidana) korporasi”.

Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lain. Seperti halnya keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Sementara penjatuhan pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai Undang-undang yang berlaku, seperti uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Ada sekitar 70 (tujuh puluh) Undang-Undang yang menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi minim diproses dan diputus hingga ke pengadilan. Seperti kejahatan pencurian ikan, pembalakan liar, pembakaran Hutan, tindak pidana korupsi, pengrusakan lingkungan, pencucian uang yang dilakukan korporasi. Sebab, KUHAP sendiri tidak menentukan petunjuk teknis penyusunan dakwaan ketika subjek hukum pelakunya korporasi. Praktiknya, penyidik dan penuntut umum enggan atau tidak berani

melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran kesulitan menyusun dan merumuskan dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi. Pengadilan pun ketika

mengadili perkara kejahatan korporasi sangat bergantung dakwaan yang diajukan penuntut umum.³⁶

Maka berdasarkan hal tersebut, tentu sangat menarik apabila Hukum yang diberlakukan atau dibuat itu benar-benar langsung menyentuh secara teknis, agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara optimal

b. Profesionalisme aparat penegak hukum

Negara-negara berkembang pada umumnya birokrasi pemerintahannya cenderung Sulit untuk berubah kearah yang lebih baik. Birokrasi pemerintahannya masih berada posisi yang kurang atau tidak stabil dan belum menemukan pola kerja yang baik. Namun dengan kuasanya Birokrasi, sikap aparatur pemerintah sering menjadi merasa paling Tahu (yang lebih mengetahui diantara yang mengetahui), paling mampu/Bisa dan

paling berkuasa. Ketiga sikap ini dapat dikatakan sudah menjadi nilai para pegawai Birokrasi pemerintah.

Setidaknya ada lima Ciri kondisi Birokrasi Pemerintah yang lemah, yaitu:³⁷

1. Pola dasar (*Basic Pattern*), yaitu system administrasi negaranya merupakan tiruan dari sistem Administrasi Kolonial belanda, yaitu bersifat Elistis, Otoriter dan cenderung terpisah (sebagai menara Gading) dari masyarakat dan lingkungannya.
2. Birokrasi Pemerintah kekurangan sumberdaya yang berkualitas baik dari segi kepemimpinan, manajemen, kemampuan dan keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan. Sebaliknya, kondisinya yang sering dijumpai adalah banyaknya Sumber daya Manusia yang Kurang Berkualitas dengan pembagian Tugas yang tidak Jelas, akibatnya adalah terjadinya Inefisiensi dalam penggunaan Sumber daya manusia dan penumpukan Pegawai dalam satu Unit kerja atau Instansi.
3. Birokrasi cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada

³⁶ Media hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedurpenanganan-pidana-korporasi>, diakses pada 13 Oktober 2018, pukul 22.15 Wib

³⁷ Setia Budi, *Aparatur Pemerintahan yang profesional, dapatkah diciptakan?*, dalam Pdf, hlm.6

kepentingan masyarakat atau pencapaian sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

4. Apa yang dinyatakan baik tertulis maupun lisan oleh birokrasi cenderung adanya ketidaksesuaiannya dengan realita.
5. Birokrasi cenderung bersifat Otonom dalam arti lepas dari proses Politik dan pengawasan Masyarakat.

Secara Spesifik yang menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan secara langsung yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi adalah aparat Penegak hukum. Aparat Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan, untuk membantu dan mengurus penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

c. Kesadaran hukum masyarakat

Secara bentuk, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran

maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak

perencanaan yang disengaja.³⁸ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.³⁹

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum

³⁸ Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. 2004. hlm.194

³⁹ Ramly Hutabarat. *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.78

semata-mata yang hanya memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan

kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴⁰

Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam Sebab:⁴¹

- a) Sebagian Orang menerimanya karena peraturan itu sungguh-sungguh dirasakannya sebagai hukum, bagi mereka peraturan itu sungguh-sungguh merupakan peraturan hukum. Mereka berkepeningan sungguh-sungguh akan berlakunya peraturan tersebut sebagai Peraturan hukum.
- b) Setengah orang lainnya menerima peraturan itu, oleh karena mereka harus menerimanya supaya ada ketenteraman dalam masyarakat. Dengan demikian mereka menganggap peraturan itu sebagai peraturan hukum. Jadi, di sini ada suatu penerimaan rasional (*Rationale Anvaarding*).
- c) Karena masyarakat menghendaknya, dalam kenyataannya banyak orang

yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan difikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

- d) Karena adanya paksaan (Sanksi Sosial), orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asocial apabila melanggar sesuatu kaidah sosial / Hukum.

Dari yang disampaikan oleh Utrecht, tidak ada menyinggung tentang pengetahuan Hukum, bila suatu aturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sudah resmi, maka secara Yuridis peraturan perundang-undangan berlaku, kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga Masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum lingkungan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum lingkungan tersebut di tengah tengah masyarakat.

Keterbatasan tingkat kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm.178

⁴¹ C.S.T.kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.233

pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan, sementara di sisi lain hanya memikirkan keuntungan besar bagi korporasi.⁴² Sebenarnya para pengusaha tersebut mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan akibat yang timbul dari aktivitasnya, karena pengelolaan limbah maupun pembukaan lahan perkebunan memerlukan teknologi tinggi dan dukungan para ahli di bidangnya, maka pekerjaan itu menjadi mahal dan akan mengurangi tingkat *profit*. Untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh, maka mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang lebih sederhana dengan biaya rendah.⁴³

Hal tersebut disebabkan oleh fungsi Hukum yang tidak berjalan dengan baik, bahwa pada dasarnya, fungsi Hukum dalam Masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah:

1) Fungsi Hukum sebagai Sosial Kontrol
(*law is a Tool Of Social Control*)

Pada dasarnya, Hukum sebagai Kontrol Sosial dapat dilihat Terhadap Penyimpangan-Penyimpangan Perilaku Seseorang Yang Terjadi

Dalam Masyarakat merupakan pranata hukum yang berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian Sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa terlaksana atau tidaknya fungsi Hukum sebagai alat

pengendali sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan Hukum dan faktor pelaksanaan Hukum, dalam permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan lemahnya faktor pelaksanaan hukum, sehingga Fungsi hukum sebagai Kontrol Sosial tidak berjalan dengan baik.

2) Fungsi Hukum sebagai Alat pengubah Masyarakat (*Law Is a Tool of Social Engineering*).

Ada faktor hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu: mempelajari Efek Sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum, melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang tersebut, melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif, serta dengan

⁴² Erdiansyah, *Op. Cit*, hlm. 160

⁴³ *Ibid*, hlm. 160

memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu Hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat, dalam hal Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

tidak memenuhi faktor-faktor bahwa regulasi dapat mengubah masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 113 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya mengatur soal bahwa pidana bagi korporasi Pelaku tindak Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasinya dan pengurusnya dan terhadap korporasinya dikenakan denda maksimal ditambah sepertiga. Pengaturan yang demikian menimbulkan persoalan, kelemahan dalam aturan tersebut diantaranya, Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, Tidak ada ketentuan kapan Pengurus

korporasi dapat dipertanggungjawabkan, Tidak ada ketentuan penghapus penuntutan atau penghapus pidana bagi korporasi, Tidak ditentukannya aturan/pedoman pemidanaan bagi korporasi.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah Faktor Hukum (Perangkat peraturan perundang undangan), Profesionalisme aparat penegak hukum dan Kesadaran hukum masyarakat.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. 2013 *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2008 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan RUU KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1996. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum , Edisi revisi*, Kencana, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum, cet I*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Kencana Pranada Group, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sahetapy, J. E. 2002. *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiyono. 2002. *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang.
- Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Malang.
- Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Story Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isi Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT.Sofmedia, Jakarta.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilmu Hukum, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015
- Perundang-undangan**
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Jurnal**
Erdiansyah, *Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran Hutan dan lahan di Provinsi Riau*, Jurnal
- Internet**
Media hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedurpenanganan-pidana-korporasi>, diakses pada 13 Oktober 2018.
- Reda Mantovani, "Penuntutan Korporasi kejahatan kehutanan" dalam http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Reda%20M_Penuntutan%20Korporasi%20dalam%20Kejahatan%20Kehutanan.pdf, terakhir diakses pada 1 Mei 2018.
- Wikipedia, *Pertanggungjawaban Korporasi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diunduh pada Selasa 07 Oktober 2018.